

ISU-ISU KRITIS KEBIJAKAN BAHASA DAN PENGAJARAN BAHASA

Ajeng Tina Mulyana, M.Pd.

Dosen Universitas MH. Thamrin

Email: *ajengtinamulyana28@gmail.com*

ABSTRAK

Bahasa memiliki peran kunci dalam kehidupan manusia. Bahasa memungkinkan manusia berinteraksi dengan sesamanya, dapat saling mengenal, memahami, dan saling bekerja sama untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa juga merupakan media perolehan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih di era informasi dan komunikasi global saat ini peran bahasa makin strategis, sehingga kemampuan dan penguasaan bahasa makin dipersyaratkan. Kebijaksanaan bahasa merupakan satu pegangan yang bersifat nasional, untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat. Kebijakan bahasa ini diatur pada UU No. 24 tahun 2009, kemudian di BAB III, pasal 25 s.d. pasal 45 yang mengatur tentang pengembangan bahasa. Namun, banyak isu-isu kritis yang menjadikan kebijakan bahasa ini hanyalah aturan semata tanpa ada realisasinya dalam kehidupan dan juga pengajaran. Pengejawantahan mengenai penerapan pengajaran bahasa dituangkan dalam UU No. 20 tahun 2003.

Kata kunci: *Isu-isu kritis, kebijakan bahasa, pengajaran*

A. PENDAHULUAN

Kebijaksanaan bahasa merupakan satu pegangan yang bersifat nasional, untuk kemudian membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara, dan dapat diterima oleh segenap warga yang secara lingual, etnis, dan kultur berbeda (Chaer & Agustina, 2004: 177).

Kebijaksanaan merupakan satu pegangan yang bersifat nasional yang mempunyai tujuan akhir, yakni sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh Negara dan dapat diterima oleh segenap warga secara lingual, etnis, dan kultur yang berbeda (Aslinda & Syafyahya, 2010: 113). Dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan itu dapat diartikan sebagai suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan

perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional, sehingga bahasa dapat dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

Kebijakan Bahasa berkenaan dengan empat unsur: (a) mengapa perwujudan bahasa Indonesia perlu direncanakan, (b) apa yang direncanakan, (c) siapa yang merencanakan, dan (d) bagaimana merencanakannya. Jawaban dari persoalan diatas akan menjadi dasar pengambilan kebijaksanaan bahasa yang bersifat menyeluruh.

1. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini penulis merumuskan:

- a. Bagaimana usaha agar penggunaan bahasa Indonesia dapat diterapkan dalam berbagai lini kehidupan?
- b. Bagaimana usaha agar bahasa Indonesia dipergunakan sesuai dengan fungsinya?
- c. Bagaimana bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi berkembang menurut sistemnya?
- d. Bagaimana peran serta pendidik dalam pengembangan bahasa?

2. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana isu-isu kritis mengenai kebijakan bahasa dalam kehidupan
2. Mengetahui sejauh mana peranan pendidik dalam pengajaran bahasa Indonesia
3. Memprediksi solusi apa yang seharusnya diambil pemerintah demi menegakan kebijakan bahasa.

B. Kajian Teoretik

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan secara teoretis mengenai hakikat isu-isu kritis kebijakan bahasa, dan peran serta pendidikan serta memprediksi solusi apa yang seharusnya diambil pemerintah demi menegakan kebijakan bahasa. Penulis menyakini, antara esensi UU No. 24 tahun 2009, dan kenyataan yang ada terkait dengan kebijakan bahasa Indonesia saat ini, sangat jelas berbeda antara harapan (*das sollen*) dan realitas (*das sein*), sangatlah jauh melenceng.

1. Isu-Isu Kritis Kebijakan Bahasa

Suatu rencana pasti akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya khususnya untuk kebijakan bahasa. Hambatan boleh saja terjadi ketika perencanaan sedang disusun, bahkan ketika suatu rencana sedang dilaksanakan. Hambatan-hambatan itu meliputi:

- a. Pemegang kebijakan
- b. Sikap penutur bahasa

c. Dana

d. Ketenagaan

Kadang rencana yang telah disusun mendapat hambatan dari pemegang kebijakan, maksudnya pemegang kebijakan yang bukan berurusan dengan persoalan kebahasaan. Misalnya di Indonesia, lembaga yang ditugaskan untuk menentukan garis kebijakan kebahasaan adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan, dalam hal ini pusat pembinaan dan pengembangan bahasa.

Sikap penutur bahasa sangat menentukan kebijakan bahasa. Sebab, apapun yang ditetapkan oleh para ahli, apapun yang ditentukan oleh kementerian, penutur bahasalah yang akhirnya menentukan, penutur bahasalah yang mempergunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sikap penutur bahasa harus diubah dari sikap negatif ke sikap positif. Sikap negatif misalnya tercermin dari sikap tidak mau tahu tentang garis kebijakan yang sedang dijalankan. Sikap negatif tercermin pula dari ucapan bahwa persoalan kebahasaan hanya tanggung jawab pemerintah dan ahli bahasa. Sikap-sikap seperti ini sangat menghambat perencanaan dan kebijakan bahasa.

Suatu rencana juga memerlukan dana dan fasilitas. Tanpa dana tak terlalu banyak yang dapat dibuat. Namun, perlu diingatkan tanpa dana pun masih ada yang dapat dibuat. Dana boleh saja berasal dari pemerintah, tetapi boleh juga dari perseorangan, yayasan, dan sebagainya. Hanya yang perlu dipersoalkan ialah pemanfaatan dana yang disediakan. Semisal saja dalam pelaksanaan UKBI (Uji Kemahiran Bahasa Indonesia) pada dasarnya masih banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak memiliki kesadaran untuk mengikuti tes tersebut, bahkan lebih jauh lagi mereka tidak mengetahui sama sekali mengenai UKBI tersebut, ditambah lagi mengenai pembebanan biaya yang bebaskan kepada si peserta uji yang dinilai terlalu mahal (merujuk kepada pelaksana UKBI yang sangat terbatas) hanya diselenggarakan oleh badan bahasa, dan bersifat kolektif.

Penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang dan jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia hal ini sesuai dengan pasal 37, memang pada dasarnya informasi pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing asalkan sesuai dengan keperluan, (Arifin, 2015: 129), dan tidak boleh secara keseluruhan menggunakan bahasa asing. Sebaiknya pemerintah sudah mulai mengatur regulasi yang jelas mengenai batasan bahasa iklan dengan bahasa Indonesia, karena bagaimana pun hal ini masih bersifat abu-abu, antara pengertian bahasa iklan dan kebijakan bahasa.

Kebijakan pengembangan aspek kebahasaan, banyak sekali istilah-istilah baru dalam bahasa Indonesia yang masih sangat berjuang untuk disosialisaikan, (hanya sebagian orang yang mengetahui) seorang penutur sekalipun tahu istilah baru bahasa Indonesia namun, lidah mereka terasa aneh untuk menyebutkannya. Istilah-

istilah itu seolah tidak disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, padahal dalam pengembangan bahasa diperbolehkan mempergunakan *borrowing*, baik secara peminjaman murni (*pure borrowing*) atau peminjaman alamiah (*naturalized borrowing*) contoh misalnya pada kata “*music*” kemudian menjadi “musik” secara *calque* yaitu secara harfiah menerjemahkan dari sebuah kata atau frasa dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran misalnya “*assistant manager*” menjadi “asisten manajer”. Contohnya, pada daftar istilah baru bahasa Indonesia ada kata “*sangkil dan mangkus*” yang menggantikan posisi “efektif dan efisien” sedangkan orang Indonesia sudah jauh lebih mengenal itu dibandingkan dengan “sangkil dan mangkus”. Dikhawatirkan istilah tersebut dikembangkan dan tidak ada penuturnya (hanya memfosil). Jika merujuk kepada kebijakan bahasa di Jepang, mereka jauh lebih menyesuaikan bahasanya dengan *borrowing* dan *calque*. Sehingga bahasa Jepang selalu dituturkan oleh warga Jepang dalam berbagai kesempatan ada sikap positif masyarakat pada sikap bahasa (*language attitude*).

Akhirnya kesulitan yang didapati dalam pelaksanaan perencanaan bahasa ialah faktor ketenagaan. Tenaga kebahasaan adalah seorang atau sekelompok orang yang secara sadar ikut serta dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa, terutama Indonesia (Arifin, 2015: 144). Tenaga yang terlatih menangani soal-soal kebahasaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat kurang, padahal kualitas bahasa penutur salah satu pendukung dalam pengembangannya, salah satunya adalah guru/pendidik, dengan mengadakan banyak *workshop*, seminar dan lokakarya kebahasaan bisa meningkatkan kualitas tenaga kebahasaan, selain itu kesejahteraan tenaga kebahasaan pun harus diperhatikan, agar dapat melaksanakan tugas pengabdianya dengan baik.

2. Pengajaran Bahasa

Secara umum tujuan pengajaran bahasa di lembaga lembaga pendidikan adalah untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Tujuan tersebut jika ditinjau dari sudut pemakai dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) tercapainya pemakaian bahasa Indonesia baku yang cermat, tepat, dan efisien dalam berkomunikasi; (2) tercapainya pemilikan keterampilan berbahasa Indonesia baik dalam penggunaannya sebagai alat komunikasi maupun dalam ilmu pengetahuan yang sah; (3) tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab yang tampak dari perilaku sehari-hari

Kaitan antara fungsi bahasa dengan pendidikan nasional setidaknya terurai dalam empat hal pokok. Keempat hal itu ialah: (1) sebagai mata pelajaran pokok, artinya bahasa Indonesia yang diajarkan hendaknya adalah bahasa Indonesia dengan ciri serta syarat ragam bahasa baku, baik lisan maupun tulis, dan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berfungsi sebagai bahasa modern; (2) sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan jenjang lembaga pendidikan,

artinya bahasa Indonesia yang diajarkan hendaknya memiliki ciri dapat menjalankan tugas sebagai alat komunikasi; (3) sebagai bahasa penalaran; dan (4) sebagai bahasa pengungkap pengembangan diri dari hasil pendidikan. Sebagai bahasa penalaran dan pengungkap pengembangan diri hanya dapat diwujudkan jika bahasa Indonesia tersebut memiliki bentuk yang estetik (fleksibel), luwes sehingga dapat dipergunakan untuk mengekspresikan makna-makna baru, dan mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan tersebut. Pengajaran bahasa Indonesia yang mengarah pada model pengajaran komunikatif masih belum secara intens dilakukan. Model pengajaran yang dilakukan selama ini masih model terstruktur yang hanya mengajarkan bahasa dari segi teoretis. Kepraktisan bahasa Indonesia sebagai komponen komunikasi belum begitu diperhatikan. Demikian pula pengajaran sastra bahwa pengajaran sastra selama ini hanya memberi beban kepada siswa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayuti (1994:1) bahwa pengajaran bidang sastra sejak tahun 1950-an sampai dengan tahun-tahun terakhir ini masih saja mengarah kepada hal-hal yang bersifat hapalan sejarah. Bahkan, sejak tahun 1955 telah muncul beberapa kritik dari para sastrawan atas ketidakpuasannya terhadap hasil pembelajaran sastra terutama terkait dengan apresiasi sastra (Sayuti, 1994:1). Menurutnya pengajaran sastra selama ini telah menyimpang dari amanat kurikulum.

3. Fokus Masalah

Penelitian ini memfokuskan masalah pada isu-isu kritis kebijakan bahasa dan pengajaran khususnya pada isu-isu kritis kebijakan bahasa Indonesia dan aplikasi dalam pengajaran. Dengan menarasikan dokumen-dokumen berupa UU dan PP kebijakan bahasa Indonesia serta melakukan FGD dengan beberapa pengajar bahasa Indonesia dari berbagai universitas.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bog dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Studi naratif adalah studi tentang seorang individual dan pengalamannya sebagaimana dikatakan kepada peneliti atau ditemukan dalam dokumen-dokumen dan materiil arsip (Emzir, 2010:26).

1. Metode Pengumpulan Data

Dokumen-dokumen UU dan Kebijakan Bahasa

- a. UU No. 24 Tahun 2009 sebagai pedoman kebijakan bahasa
- b. UU No.20 Tahun 2003 sebagai pedoman pengajaran bahasa Indonesia

2. *Focus Group Discussion (FGD)*

Dalam penelitian ini penulis melakukan diskusi dengan beberapa guru bidang studi (khususnya pengajar bahasa Indonesia mengenai kebijakan dan pengajaran bahasa) dan apa persepsi mereka mengenai kenyataan bahasa Indonesia saat ini, apa peran mereka selaku tenaga kebahasaan . dengan FGD ini Peneliti ingin memperoleh informasi mendalam tentang tingkatan persepsi, sikap, dan pengalaman yang dimiliki informan mengenai isu kritis kebijakan bahasa dan pengajaran bahasa.

Subjek riset naratif ini melibatkan 10 dosen bidang studi bahasa Indonesia sekaligus sebagai sampel dalam penelitian. Hal ini peneliti lakukan demi mendapatkan nilai akurasi penilaian yang tepat mengenai kebijakan bahasa dan pengajaran (khususnya pada kebijakan dan pengajaran bahasa Indonesia).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah sebaiknya melakukan tindak lanjut yang memungkinkan untuk diambil demi memenuhi harapan : (1) mutu pengajaran bahasa Indonesia di semua jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini dapat dimulai dengan meningkatkan kemampuan guru Bahasa Indonesia, pengembangan bahan pelajaran yang sesuai dengan fungsi komunikatif dan integratif bahasa, dan kebudayaan serta penalaran, pemberian pengalaman belajar kepada siswa; (2) memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pendidikan dan pengajaran dan pola kebijaksanaan nasional kebahasaan harus disusun. Hal ini dapat dilakukan dengan penentuan strategi pengajaran, pengembangan tatabahasa anutan, penggunaan tatabahasa yang baik dan benar/ PUEBI, kemantapan kemampuan berbahasa Indonesia sebagai persyaratan untuk berbagai macam kenaikan pangkat dan tingkat, pemanfaatan media massa sebagai model penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; (3) pengajaran sastra perlu ditekankan pada aspek apresiasi; (4) bahan pelajaran bahasa Indonesia perlu mencakup latihan menyimak, berbicara, membaca dan menulis serta perlu pula dikembangkan ketrampilan membaca (membaca cepat); (5) pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia hendaknya memanfaatkan organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan; (6) pembinaan apresiasi sastra perlu dilaksanakan sedini mungkin; (7) perlu dikembangkan bahan pengajaran bahasa Indonesia yang dibutuhkan bagi bidang-bidang khusus, selain ditujukan kepada berbahasa secara umum di sekolah; (8) pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strateginya bertujuan menjamin hak hidup bahasa dan kebudayaan daerah hendaknya mempunyai nilai positif; (9) kurikulum lembaga pendidikan tinggi hendaknya memasukkan program pendidikan bahasa Indonesia;

(10) hasil penelitian kebahasaan dan pengajaran bahasa hendaknya disebarluaskan dan dimanfaatkan; dan (11) pelaksanaan wajib belajar perlu dimanfaatkan untuk menyukseskan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

E. SIMPULAN

Bahasa Indonesia sebagai Identitas Nasional sebaiknya dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam segala bidang dan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional sebaiknya dibuktikan dengan digunakannya Bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Misalnya saja buku, koran, acara pertelevisian, siaran radio, website, dll.

Guru/pendidik merupakan kunci sentral untuk keberhasilan suatu pelajaran. Terlebih lagi apabila lingkungan tempat pembelajaran kurang menguntungkan, peran guru/pendidik sangat berarti bagi siswa karena penentu keberhasilan suatu pengajaran salah satunya sangat dipengaruhi oleh guru/pendidik terlebih lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, E. Zaenal (2015). *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Pustaka Mandiri
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chaer, Abdul dan Agustina, Leonie. 2004. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aslinda dan Syafyahya L. 2010. *Pengantar Sosiolinguistik*. Bandung: Refika Aditama.
- John W. Creswell. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.
- UU No. 24. (2009). Kebijakan bahasa. Jakarta: Kemenristek.
- UU No. 20. (2003). SISDIKNAS
- Warsiman.2007. *Kaidah Bahasa Indonesia yang Benar*. Diunduh 31 Januari 2016. (<http://warsiman.lecture.ub.ac.id/kebijakan-pembinaan-dan-pengembangan-bahasa/>)
- <http://www.sekolahdasar.net/2011/10/tujuan-pembelajaran-bahasa-indonesia-di.html#ixzz4XRKHxuQE>, [online] di unduh 28 April 2017.